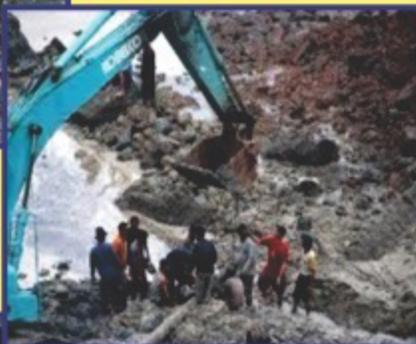




ETNOREFLIKA

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HALU OLEO

Volume 3, Nomor 1, Februari 2014



Pengobatan Tradisional Suku Bajo
di Desa Tanjung Pinang
Kecamatan Kusambi
Kabupaten Muna

Kajian Ekolinguistik terhadap
Ketergerusan Leksikon Kesuguan
pada Masyarakat Tolaki
di Kabupaten Konawe

Jeneponto dalam Dua Dimensi Tradisi:
Satu Tinjauan Arkeologi

Sejarah Persebaran, dan Klasifikasi
Bahasa Tolaki di Sulawesi Tenggara

Faktor Penghambat Tingkat Partisipasi
Anak Usia Sekolah pada Pendidikan Dasar
dan Menengah di Desa Cempedak
Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin
di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan
Wua-wua Kota Kendari

Model Kemitraan untuk Mewujudkan Program
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan
terhadap Komunitas Lokal dalam Upaya
Pengentasan Kemiskinan
di Sulawesi Tenggara

Buruh Migran Perempuan: Identifikasi
terhadap Perlindungan dan Pemberdayaannya
di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi
Kabupaten Konawe

Analisis Penggunaan Bahasa Non Verbal
Dominan dalam Komunikasi
Anak Tunarungu

Jurnal ETNOREFLIKA didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran dalam bidang Antropologi, khususnya dan ilmu - ilmu sosial pada umumnya. ETNOREFLIKA hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.

Selain itu, Jurnal ETNOREFLIKA yang secara sengaja mengambil kata generik 'ethnos' yang bertujuan mengemban misi mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reflika dimaknai sebagai proses merefleksikan perilaku, ide dan lingkungannya.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian berupa etnografi, dan tulisan—tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk menyelesaikan problem sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara elektronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata, catatan kaki agar dibuat di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOREFLIKA terbit tiga kali dalam setahun.

Etnoreflika

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
VOL.03-NO.01- Februari 2014
ISSN: 2252-9144

Penasihat

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo
Ketua Jurusan Antropologi Universitas Halu Oleo

Penanggung Jawab

Kepala Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Pemimpin Redaksi

Laxmi, S.Sos., M.A

Wakil Pemimpin Redaksi

Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si

Sekretaris Redaksi

Raemon, S.Sos., M.A.

Dewan Redaksi

Dra. Hj. Wa Ode Sitti Hafsa, M.Si
Dra. Wa ode Winesty Sofyani, M.Hum.
Drs. Syamsumarlin, M.Si
Dra. Hasniah, M.Si
Hartini, S.Sos., M.Si
La. Janu, S.Sos., M.A.
Ashmarita, S.Sos., M.Si
La Ode Aris, S.Sos., M.A.
Rahmawati, S.Pd., M.A.
Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.

Mitra Bestari

Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si (Unhalu),
Prof. Dr. H. Pawenari Hijang, M.A (Unhas),
Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, M.A. (Untad)
Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A (UGM),
Dr. Nicolas Waroow, M.A (UGM),
Dr. Munsil Lampe, M.A. (Unhas).

Tata Usaha

Hadrianti
Reni

Sirkulasi

Alham Haidir
Safri
Yusran Saeda
Muh. Okmi Heriansyah

Kuangan

Risnawati

Etnoreflika Online

Fina Amalia M. S.Pd., M.Hum.
Edo Sanjani
Adi, S.Sos

Penerbit

Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Alamat Redaksi

Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit,
Ruang Jurusan Antropologi F I B,
Universitas Halu Oleo, Kendari 93232

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya segala yang kita lakukan dengan kerja keras dapat terlaksana dengan baik. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 1 bulan Februari tahun 2014 telah terbit dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan tersebut merupakan hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai disiplin ilmu, yakni sosial dan budaya yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 1, Februari 2014, memuat tulisan sebagai berikut:

- Pengobatan Tradisional Suku Bajo di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna.
- Kajian Ekolinguistik terhadap Ketergerusan Leksikon Kesaguan pada Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe.
- Jenepono dalam Dua Dimensi Tradisi : Suatu Tinjauan Arkeologi.
- Sejarah Persebaran, dan Klasifikasi Bahasa Tolaki di Sulawesi Tenggara.
- Faktor Penghambat Tingkat Partisipasi Anak Usia Sekolah pada Pendidik Dasar dan Menengah di Desa Cempedak Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.
- Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari.
- Model Kemitraan untuk Mewujudkan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan terhadap Komunitas Lokal dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Sulawesi Tenggara.
- Buruh Migran Perempuan : Identifikasi terhadap Perlindungan dan Pemberdayaannya di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.
- Analisis Penggunaan Bahasa Non Verbal Dominan dalam Komunikasi Anak Tunarungu.

Semoga sajian dalam jurnal ini, dapat memberikan kontribusi, informasi maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

Nasruddin Suyuti La Ode Aris	381-389	Pengobatan Tradisional Suku Bajo di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna
Aris	390-399	Kajian Ekolinguistik Terhadap Ketergerusan Leksikon Kesaguan pa- da Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe
Abdul Rauf Suleiman	400-415	Jeneponto dalam Dua Dimensi Tradi- si : Suatu Tinjauan Arkeologi
Basrin Malemba	416-433	Sejarah Persebaran, dan Klasifikasi Bahasa Tolaki di Sulawesi Tenggara
La Janu	434-442	Faktor Penghambat Tingkat Partisipasi Anak Usia Sekolah pada Pendidik Dasar dan Menengah di De- sa Cempedak Kecamatan Laonti Ka- bupaten Konawe Selatan
Makmur Kambolong	443-454	Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Ma- taiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari
Ashmarita	455-465	Model Kemitraan Untuk Mewujudkan Program Tanggung Ja- wab Sosial Perusahaan Pertambangan Terhadap Komunitas Lokal dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Sulawesi Tenggara
Laxmi	466-488	Buruh Migran Perempuan : Identifi- kasi Terhadap Perlindungan dan Pem- berdayaannya di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe
Marsia Sumule Genggong Gista Yanuarti	489-495	Analisis Penggunaan Bahasa Non Verbal Dominan dalam Komunikasi Anak Tunarungu

**BURUH MIGRAN PEREMPUAN: IDENTIFIKASI TERHADAP
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAANNYA DI DESA KORUMBA
KECEMATAN WAWOTOBİ KABUPATEN KONAWÉ¹**

Laxmi²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang dialami buruh migran perempuan di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Lemahnya kebijakan yang berpihak kepada buruh perempuan menjadi salah satu pertimbangan mendasar sehingga penelitian ini penting untuk menemukan identifikasi yang mereka alami. Kurangnya data yang bersifat akademis, baik secara kualitas maupun kuantitas data menyebabkan para pihak belum bisa menemukan langkah strategis terhadap persoalan yang dialami buruh perempuan di Desa Korumba, ditambah lagi Kabupaten Konawe seringkali dijadikan “kantong” buruh migran perempuan yang berasal dari daerah Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu penelitian menjadi penting dilakukan sehingga akan diperoleh titik temu terhadap berbagai persoalan yang dialami buruh migran perempuan yang ada di Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian ini akan melakukan identifikasi yang melatarbelakangi perempuan memilih sebagai buruh migran di luar negeri, serta masalah yang dialami buruh migran perempuan sejak keberangkatannya hingga kepulangannya di daerah asal. Dengan demikian akan ditemukan bentuk-bentuk pemberdayaan hingga perlindungan yang lebih sesuai dengan kasus yang dialami buruh migran perempuan, khususnya di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan daerah Sulawesi Tenggara secara umum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, latar belakang perempuan memilih buruh migran karena ingin merubah nasib, mencari pengalaman dan ingin membiayai sekolah anak. Masalah yang dialami buruh migran terjadi sejak awal keberangkatan hingga tiba di daerah tujuan (Arab Saudi), sehingga bentuk perlindungan dan pemberdayaannya dilakukan secara jangka panjang berupa penguatan CBO (komunitas buruh migran), maupun jangka pendek, dan yang paling mendesak adalah merumuskan regulasi melalui naskah akademik yang di perkuat melalui Perda.

Kata kunci : buruh migran perempuan, pemberdayaan, dan perda

ABSTRACT

This research was conducted because of the many cases that experienced by women migrant workers in the Korumba Village, Wawotobi District of Konawe. The weak policies that favour female workers became of the fundamental considerations, so this research is important to find the identification that they experienced. Lack of academic data, both in quality and quantity caused the parties have not been able to find a strategic step towards the problems that experienced by women workers in the Korumba village, moreover Konawe often used as a "pocket" of women migrant workers from Southeast Sulawesi. Therefore, it became important to do research in order to obtain intersection to problems that experienced by women migrant workers in Southeast Sulawesi. The purpose of this study is to identify the reasons of women that choose as migrant workers in abroad, as well as the problems that experienced by migrant workers since her departure until her return in the region of origin. Thus, it finds the forms of empowerment until the protection in accordance with the case with women migrant workers, especially in the Korumba Village, Wawotobi District of Konawe and Southeast Sulawesi in general. The results of this study

¹ Hasil Penelitian

² Staf Pendidik pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Kampus Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit Kendari 93232, Pos-el: laxmi77antro@yahoo.com

found that the reason of women chose as migrant workers because they wanted to change the fate, to fine the experience, and to pay school fees. The problems were experienced by migrant workers since the beginning of departure to arrive at the destination (Saudi Arabia), moreover the form of protection and empowerment was done in the form of long-term strengthening of CBOs (community of migrant workers), as well as short-term, and most urgent was to formulate regulations through a script academic strengthened through legislation.

Key words: *women migrant workers, empowerment, and local regulations*

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 8 maret tahun 2013, berbagai lembaga yang fokus terhadap persoalan perempuan melakukan diskusi publik, kegiatan seperti ini sudah sangat lazim dilakukan karena bertepatan dengan momentum hari perempuan Internasional. Banyak persoalan yang di jadikan isu sentral pada setiap memperingati hari perempuan Internasional, dan khusus di Sulawesi Tenggara, lembaga-lembaga perempuan lebih memfokuskan isunya berkaitan dengan persoalan buruh migran perempuan yang sampai saat ini masih menjadi persoalan di daerah Sulawesi Tenggara. Persoalan buruh migran ini, sesungguhnya telah menjadi persoalan yang secepatnya memperoleh perhatian oleh berbagai pihak. Hal ini dikarenakan telah banyak korban yang dirugikan akibat tidak adanya penyelesaian yang dapat membantu korban untuk memperoleh penanganan yang baik pasca kepulangannya dari daerah tujuan di luar negeri.

Persoalan buruh migran perempuan di Sulawesi Tenggara menjadi semakin krusial ketika terungkapnya kasus yang di alami oleh ibu Aryatin, salah satu buruh migran yang berasal dari Kabupaten Konawe. Ibu Aryatin hanyalah salah satu bagian dari banyaknya persoalan yang dialami buruh migran perempuan di Sulawesi Tenggara. Sebagaimana diberitakan pada harian Umum Bumi Anoa yang terbit di Konawe, kasus buruh migran yang menimpa ibu Aryatin berkaitan dengan berbagai hal, sejak awal keberangkatannya hingga kepulangannya di da-

erah asal. Begitupun yang di sampaikan lembaga Solidaritas Perempuan (SP) Kendari yang konsen mengadvokasi persoalan buruh migran. Sebagian besar buruh migran perempuan asal Kabupaten Konawe mengalami pelanggaran, seperti gaji tidak dibayarkan, pelecehan seksual, pemerkosaan, tidak dibolehkan berkomunikasi dengan keluarga atau sesama buruh migran perempuan, hingga kasus buruh migran perempuan yang dijual ke majikan lain.

Timbulnya berbagai masalah yang dialami buruh migran perempuan asal Sulawesi Tenggara, berbanding terbalik dengan kondisi sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya, seharusnya jaminan sosial yang di peroleh buruh migran perempuan sejak awal keberangkatannya hingga kepulangannya di daerah asal, harus lebih baik jika dibandingkan buruh migran yang berasal dari daerah lain. Hal ini di dasarkan pada realitas ekonomi Sulawesi Tenggara yang setiap tahunnya cenderung meningkat, oleh karena itu secara ekonomi, tidak ada alasan bagi buruh migran perempuan untuk mencari nafkah di luar negeri jika hanya persoalan ekonomi semata. Hal ini diperkuat dengan pernyataan wakil Gubernur Sulawesi Tenggara terhadap angka pertumbuhan ekonomi Provinsi yang mencapai 11, 58%. Proyeksi pertumbuhan ini jauh lebih besar dari pada pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 6,4% triwulan kedua tahun 2012, dan jauh lebih besar dari Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi yang hanya mencapai 6,6% (Kompasiana, 25 Feb 2013).

Belum terungkapnya dengan baik-

persoalan yang di alami buruh migran perempuan di Sulawesi Tenggara, maka secepatnya diperlukan langkah-langkah strategis, baik dari segi perlindungan maupun pemberdayaannya, sehingga istilah “trauma” tidak menjadi bayangan buruk bagi buruh migran perempuan khususnya yang akan kembali berangkat ke luar negeri. Bagaimanapun, keinginan maupun harapan setiap buruh migran perempuan untuk memperbaiki hidup dengan berangkat ke luar negeri adalah hal yang tidak bisa dihindari. Sejalan dengan naluri manusia untuk memuaskan diri dengan hasil yang dimiliki baik berupa materi maupun non materi.

Kondisi yang perlu dicermati bersama saat ini, untuk kasus pengiriman buruh migran perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak terlepas dari realitas bahwasungguhnya jumlah tenaga kerja (laki-laki maupun perempuan) yang berangkat ke luar negeri, dalam catatan di BN-P2TKI sangat sedikit dibandingkan provinsi lain. Adapun data yang tercatat di Pusat Litbang dan Informasi (PUSLITFO) - BNP2TKI, jumlah tenaga kerja (laki-laki dan perempuan) di luar negeri dari Provinsi Sulawesi Tenggara selama 3 (tiga) tahun terakhir tercatat secara berturut-turut yaitu pada tahun 2010 sejumlah 190 orang, tahun 2011 sejumlah 496 orang dan tahun 2012 tercatat 641 orang. Di samping itu, terdapat 120 orang yang di layani di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP-3TKI) Kendari Provinsi Sultra, selebihnya di layani di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Makassar dan Provinsi DKI Jakarta (Musnal, Kompasiana 2013).

Disatu sisi secara kuantitas cukup menggembirakan bagi pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap berkurangnya keinginan masyarakat untuk melakukan keberangkatan ke luar negeri dengan alasan mencari nafkah, namun di

sisi lain persoalan yang mengancam kehidupan mereka masih terus berlangsung karena tidak adanya regulasi yang berpihak kepada kehidupan buruh migran perempuan sejak awal keberangkatannya hingga kepulangannya di daerah asal, sebab dari hasil penelusuran sementara diperoleh data bahwa pihak PJTKI selaku lembaga yang memberangkatkan para buruh migran seakan lepas tangan terhadap persoalan yang menimpa buruh migran perempuan khususnya yang berasal di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi sebagai satu-satunya “kantong” pengiriman terbesar buruh migran perempuan di Sulawesi Tenggara.

Tujuan penelitian ini secara khusus dapat di uraikan sebagai berikut, (a) mengidentifikasi hal yang melatar belakangi perempuan di Desa Korumba memilih bekerja di luar negeri sebagai buruh migran; (b) menemukan masalah-masalah buruh migran perempuan di Desa Korumba sejak awal keberangkatan hingga kepulangannya di daerah asal; (c) mengetahui perlindungan yang diberikan oleh para pihak berkaitan dengan kasus buruh migran perempuan di Desa Korumba, serta; (d) menemukan bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan para pihak pasca kepulangan buruh migran perempuan di daerah asal.

Berkaitan dengan banyaknya kasus yang di alami buruh migran perempuan di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe yang belum menemukan titik temu bersama para pihak dalam proses pengiriman buruh migran perempuan ke luar negeri, sehingga menambah panjang secara kuantitas jumlah buruh migran perempuan yang mengalami masalah, baik secara psikis maupun fisik. Melalui penelitian ini, akan dilakukan identifikasi terhadap persoalan mendasar yang dialami buruh migran perempuan selama proses pemberangkatannya hingga kembali ke daerah asal, dengan demikian dapat ditemukan penyelesaian secara awal, hing-

ga akan menghasilkan rujukan, maupun bentuk-bentuk pemberdayaan yang dapat memulihkan buruh migran perempuan dari kondisi psikis maupun fisik yang mereka alami.

Masih kurangnya lembaga yang mengadvokasi persoalan yang di alami buruh migran perempuan di Sulawesi Tenggara, ditambah lagi minimnya atau masih kurangnya data yang akurat dan memadai untuk dijadikan rujukan oleh para pihak dalam membantu menyelesaikan masalah yang dialami buruh migran perempuan. Disamping itu, ketersediaan data terhadap masalah-masalah yang di alami buruh migran perempuan belum tersedia dengan lengkap, sehingga penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan bahkan bersifat mendesak untuk segera di lakukan proses pemberdayaan terhadap buruh migran perempuan yang menghadapi masalah secara sosial, budaya, ekonomi, dan politis.

Sampai saat ini persoalan buruh migran perempuan selalu menjadi isu strategis, bukan hanya tingkatan lokal, bahkan menjadi masalah nasional. Karakteristik persoalan yang di alami oleh buruh migran perempuan di berbagai daerah khususnya di Sulawesi Tenggara masih bersifat “abu-abu” karena dipandang sebagai persoalan pribadi perempuan atas pilihannya ke luar negeri, namun sesungguhnya persoalan buruh migran berkaitan dengan banyak hal. Hal yang tidak bisa dihindari dari persoalan buruh migran perempuan senantiasa berkaitan dengan sistem, maupun regulasi yang terjadi di daerah, dan di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi sebagai satu-satunya “kantong” buruh migran perempuan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. METODE PENELITIAN

1. Alur Pikir

Sebagaimana yang akan dicapai dalam penelitian ini, yakni Buruh Migran Pe-

empuan: Identifikasi Terhadap Penyelesaian dan Pemberdayaannya, maka penelitian ini akan menggunakan metode *action research*. Pertimbangan ini dipilih karena menyesuaikan dengan tahapan kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Pada tahap pertama dilakukan kajian melalui pengalihan data dalam bentuk mengidentifikasi hal yang melatarbelakangi buruh migran perempuan ke luar negeri. Dari hasil identifikasi selanjutnya akan dirumuskan bentuk-bentuk pemberdayaan buruh migran perempuan hingga mereka keluar dari masalah yang dialami. Pada tahun berikutnya (tahun kedua) dilakukan *action* berupa tindakan, untuk mengaplikasikan bentuk pemberdayaan bagi buruh migran perempuan. Pertimbangan ini dilakukan untuk menindaklanjuti kegiatan di tahun pertama, sehingga ditemukan kesesuaian *action* antar tahun pertama dan kedua yang sifatnya berkelanjutan. Penelitian tahap kedua akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2014 sehingga tulisan ini difokuskan pada analisis penelitian tahap pertama.

Kegiatan yang ingin dicapai pada pelaksanaan tahap pertama adalah untuk memperoleh data hasil identifikasi yang melatar belakangi buruh migran perempuan memilih ke luar negeri, dengan tahapan kegiatan megumpulkan informasi awal dari para buruh migran perempuan yang telah kembali ke daerah asalnya, sedangkan metode yang dipilih adalah metode kualitatif, sebagai metode yang paling lazim digunakan oleh kalangan ilmuwan sosial. Dalam metode kualitatif menggunakan Etnography, Studi Kasus, Grounded Theory, dan Studi Fenomena (Creswill, 1994). Untuk penelitian ini digunakan metode etnografi yang mendeskripsikan secara khas persoalan yang di alami buruh migran perempuan di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi yang diawali dengan proses identifikasi hingga bentuk perlindungan dan pemberdayaannya. Pendekatan etnografi dipilih agar peneliti dapat memahami secara lebih baik ga-

gasangasan emik yang langsung diperoleh dari subyek, karena etnografi adalah pekerjaan langsung di lapangan (Geertz, 1992). Teknik-teknik riset kualitatif, dilakukan juga melalui pengumpulan data dengan observasi partisipasi dan wawancara baik wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur atau wawancara bebas. Observasi partisipasi merupakan salah satu teknik yang sangat efektif untuk melihat, mengetahui dan merasakan fenomena yang akan diteliti (Geertz, 1992). Untuk memperdalam kajian dalam penelitian ini, metode melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data sekunder senantiasa dilakukan untuk lebih memperdalam studi ini.

2. Teknik Analisis Data

Sebagaimana bagan alir dalam penelitian ini, maka Analisis data dilakukan sejak peneliti mengumpulkan data di lapangan, dan dilakukan secara intensif setelah pengumpulan data selesai. Metode yang dilakukan dalam melakukan analisis data ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam penelitian di laporkan apa adanya, kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk mengambil kesimpulan dengan menggunakan prinsip induktif. Dari data yang diperoleh oleh informan, merupakan data primer yang kemudian dilengkapi dengan kajian dari hasil studi pustaka, selanjutnya diinterpretasi atas data-data yang diperoleh. Adapun data-data yang dilakukan merupakan sebuah pendekatan interpretatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan Clifford Gertz, yakni bukan untuk mencari dalil-dalil atau hukum yang menggeneralisasi fenomena, namun untuk mencari pemaknaan dan mengungkap makna yang terdapat dalam berbagai informasi berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Salah satu yang terpenting adalah pengalaman khas yang diceritakan oleh buruh migran perempuan berkaitan dengan berbagai hal yang mereka rasakan. Untuk menghasilkan analisis yang kuat, interpretasi yang dimaksudkan meliputi interpretasi

tekstual dan kontekstual. Analisis teks melalui hasil perbincangan dengan buruh migran perempuan mengenai kehidupannya dan peran para pihak di lingkungan. Adapun analisis kontekstual melalui proses perbincangan, maka akan diungkapkan pandangan, perasaan dan harapan buruh migran perempuan yang selanjutnya akan dibuat dalam bentuk *role play* dengan menggunakan berbagai media menarik.

C. GAMBARAN UMUM BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KONAWA

1. Kondisi Perempuan di Kabupaten Konawe

Perempuan pada umumnya digambarkan sebagai makhluk yang hidup dalam ketergantungan, bahkan di asumsikan sering menjadi beban keluarga. Pandangan seperti ini berkembang sejak zaman yang lalu baik di wilayah perkotaan, terlebih lagi pada daerah-daerah pedesaan. Dalam penelitian ini mendeskripsikan kondisi perempuan pada salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang digolongkan dalam wilayah pedesaan. Data dikumpulkan pada salah satu Desa di Kabupaten Konawe, dengan kategori perempuan yang cukup banyak berhasil, khususnya berkaitan dengan pilihan perempuan sebagai pekerja buruh migran. Penggunaan data pada penelitian ini, adalah data khusus yang di cari untuk mendeskripsikan bahwa peran dan partisipasi perempuan menjadi titik tolak untuk mengukur kemajuan sebuah daerah pada level Kabupaten maupun Kota.

Pada bagian awal ini akan disajikan data mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Konawe lokasi penelitian ini dilakukan, selanjutnya data jumlah penduduk perempuan, yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan sensus penduduk Kabupaten Konawe tahun 2011, jumlah penduduknya sebanyak 246.789 jiwa terdiri dari laki-laki 126.102 jiwa dan perempuan 120.696 jiwa. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan

penduduk Konawe naik sebesar 1,99 persen, artinya lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun dalam dasawarsa 2000-2010 sebesar 1,93 persen. Dengan demikian kepadatan penduduk Kabupaten Konawe mengalami peningkatan dari 35,6 jiwa persen meningkat menjadi 36,3 persen. Terjadinya peningkatan dalam kepadatan penduduk ini menjadi salah satu ciri yang menonjol dari laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Konawe.

Dari aspek ketenagakerjaan, berdasarkan sensus tahun 2011 penduduk Kabupaten Konawe yang berumur 15 tahun ke atas sekitar 66,02 persen atau 162.932 jiwa, dengan rincian terdiri dari angkatan kerja yang meliputi 71,09 persen bekerja dan mencari kerja 2,01 persen serta bukan angkatan kerja yang meliputi sekolah 4, 27 persen, serta mengurus rumah tangga mencapai 18,58 persen dan lainnya sebesar 4, 05 persen. Berdasarkan jumlah penduduk maupun aspek ketenagakerjaan yang disajikan di atas, secara umum menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar di bandingkan jumlah penduduk perempuan, namun demikian dari sisi ketenagakerjaan jumlah penduduk Konawe yang masuk dalam angkatan kerja sangat dominan. Hal inilah yang berkaitan dengan aspek banyaknya masyarakat yang terlibat dalam dunia kerja, dan salah satunya adalah pilihan perempuan di Kabupaten Konawe sebagai pekerja buruh migran.

Dari aspek sosial, persoalan ketenagakerjaan bagi perempuan biasanya dikaitkan dengan sikap, nilai dan pandangan modern dari perempuan (terlebih lagi jika perempuannya telah menikah). Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susanto (2004) memberikan data bahwa, umumnya perempuan mengakhiri karier pada saat akan memilih menikah, namun terdapat pengecualian misalnya ketika perempuan memilih bakat sebagai pendidik. Lain halnya pada masyarakat pedesaan, pilihan bekerja bagi perempuan bukanlah sekedar sebagai ni-

lai atau pandangan modern, namun umumnya sebagai upaya membantu perekonomian keluarga. Pada penelitian ini, juga diketahui pula bahwa salah satunya alasan perempuan memilih pekerjaan sebagai buruh migran salah satu penyebabnya untuk membiayai pendidikan anak.

Pada bagian awal penelitian ini telah di tuliskan bahwa, untuk Kabupaten Konawe, jumlah masyarakat yang masuk dalam angkatan kerja sangat besar jumlahnya yakni sekitar 71, 09 persen (Data Sensus Kabupaten Konawe Tahun 2011). Ini menandakan bahwa banyak faktor yang dapat menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat memilih bekerja walaupun belum saatnya mereka harus bekerja. Kondisi ini juga ditemui pada berbagai laporan penelitian lainnya yang mengungkapkan bahwa, dari sisi kesenjangan gender persoalan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan masih menjadi persoalan bagi Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum. Kesenjangan gender ini dapat dilihat dari perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), sebagai gambaran misalnya pada tahun 2009 IPM Sulawesi Tenggara meningkat menjadi 69, 52 namun IPG pada tahun 2009 hanya sebesar 62,89 persen (Laporan Kinerja Pelayanan Publik, 2012). Dalam mengukur IPM maupun IPG di gunakan beberapa capaian antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, hingga pengeluaran per-kapita dari setiap Kabupaten dan Kota. Begitupun pada aspek IPG, pengukuran yang digunakan yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan sumbangan pendapatan.

Di Kabupaten Konawe, menjadi buruh migran memiliki banyak alasan baik secara social maupun politik. Secara politik karena berkaitan dengan stabilitas ekonomi pemerintahan kabupaten, dan secara social karena kesadaran diri perempuan. Namun demikian, alasan politik lah yang menjadi tolak ukur mengapa perempuan lebih me-

milih bekerja sebagai buruh migran. Kondisi ini dapat kita kaitkan dengan persoalan yang di hadapi Propinsi Sulawesi Tenggara secara umum dan Kabupaten Konawe secara khusus. Misalnya saja, dari segi ekonomi diperoleh data bahwa untuk upah buruh perempuan jauh lebih rendah di bandingkan dengan upah buruh laki-laki. Untuk Kabupaten Konawe dan beberapa kabupaten lainnya diperoleh data bahwa perbedaan upah buruh yakni sebesar 46,82, 44,88, dan 44,06 (Laporan Analisis Keuangan Publik Sultra, Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, 2012). Ini menandakan bahwa semakin rendah upah buruh yang diterima perempuan akan semakin melemahkan posisinya sehingga akan mendekatkan perempuan kepada kemiskinan, sebab perempuan sebagai pihak yang sangat dekat dengan kehidupan domestic dalam pengelolaan rumah tangga.

Secara social antropologis, perempuan di Kabupaten Konawe sama halnya seperti perempuan lainnya yang ada di wilayah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia. Kegiatan perempuan tidak hanya dilihat dari aspek domestic saja, namun aspek public biasanya jauh lebih menonjol di bandingkan domestic. Gejala ini disebabkan setelah terbukanya industrialisasi baik yang berada dalam negeri maupun di luar negeri, dengan demikian sumber pendapatan kelompok perempuan bukan saja diperoleh dari sector pertanian semata yang dahulunya mendominasi pekerjaan pertanian di pedesaan, namun saat ini perempuan dapat terlibat di sektor formal seperti industri manufaktur ber klas ekspor hingga industri rumah tangga bidang perdagangan dan jasa.

Penelitian yang di lakukan Wijaya (2004) juga mengungkapkan bahwa perdagangan internasional telah menjadi kegiatan ekonomi global sehingga menjadi perhatian oleh semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan yang berada di negara maju maupun berkembang. Ini adalah salah satu da-

mpak menuju perdagangan bebas yang telah direalisasi berdasarkan kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang di tanda tangani oleh Negara anggotanya di Maraksh tahun 1994, dari dampak tersebut menimbulkan banyak persoalan khususnya perempuan yang melibatkannya dalam arus globalisasi dan ideologi gender.

Dalam kelembagaan gender, meskipun telah dinyatakan secara tegas, bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk mengutamakan pengarusutamaan gender dalam semua aspek pembangunan, namun komitmen tersebut sulit terpenuhi. Salah satu hal yang menyebabkannya karena pengarusutamaan gender belum melembaga. Kelembagaan gender di semua level kabupaten dan kota termasuk di kabupaten Konawe belum bisa menciptakan gender *equality*, bahkan *women's empowerment* di segala bidang, dengan demikian untuk perubahan yang nyata pada kelompok perempuan belum semuanya dapat terpenuhi. Sesungguhnya melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang kelembagaan gender akan dapat mengubah kebijakan dengan lebih baik jika terbentuknya POKJA Gender pada semua level Kabupaten maupun Kota, sebab Pokja ini akan memberikan dampak yang lebih baik untuk perubahan hidup dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan. Dengan demikian, persoalan buruh migran akan menjadi prioritas bagi pokja-pokja yang berada di Kabupaten Konawe.

Hadirnya kelompok kerja (Pokja Gender), selain dapat membantu persoalan yang dialami perempuan di semua lapisan, baik pada level pemerintahan juga pada aspek kemasyarakatan. Di dalam Pokja tersebut akan di jalankan oleh masing-masing Kabupaten dan Kota, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Inisiasi yang berkaitan dengan kebijakan dan implementasi program pembangunan yang berwawasan keseta-

raan dan keadilan gender (*Gender Budgeting*) yang berorientasi pada produktivitas pemerintahan, pemberdayaan dan berkelanjutan;

2. Fungsi dinamisasi berkaitan dengan melakukan diskusi, audiensi, analisis data, dan pembahasan kebijakan dan program bersama pihak yang terkait dengan pengambilan keputusan serta pengelolaan program pembangunan.
3. Sebagai penjamin mutu pokja gender melakukan monitoring, evaluasi, supervise dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pengarusutamaan gender.

Kondisi perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan khususnya berkaitan dengan lokasi penelitian ini akan berpengaruh besar dengan terciptanya Pokja gender yang berada di Kabupaten Konawe. Dengan demikian, akan memperkuat peran dan posisi perempuan untuk memilih lapangan pekerjaan yang cocok bagi dirinya, bahkan tidak akan beresiko terhadap jiwa dan keselamatannya. Pilihan menjadi buruh migran perempuan hanyalah satu diantara banyaknya pilihan pekerjaan atas kehidupan perempuan yang lebih baik dan layak.

Secara khusus, perempuan di Kabupaten Konawe yang selama ini bekerja sebagai buruh migran khususnya di Arab Saudi, terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dimana mereka harus meninggalkan tanah air dengan mengandalkan keahliannya pada ranah domestic (rumah tangga), namun kontribusi perempuan untuk sumbangan devisa negara telah menjadi bermakna untuk kontribusi pembangunan. Dulunya pekerjaan perempuan sangat dekat dengan pertanian, namun saat ini pekerjaan tersebut tidak lagi mendukung untuk perempuan, disebabkan menguatnya sector swasta dalam menguasai lahan-lahan yang terdapat di Kabupaten Konawe (Data Primer, FGD bersama masyarakat, 2012).

2. Kondisi Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) di Kabupaten Konawe

Penyalur jasa tenaga kerja atau yang biasa disingkat dengan PJTKI adalah sebuah lembaga atau organisasi yang selama ini digunakan oleh buruh migran perempuan dalam memediasi keberangkatan menuju daerah tujuan. PJTKI dalam berbagai fungsinya dapat di telusuri dari berbagai macam perbedaan, baik perbedaan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini akan di deskripsikan 2 jenis PJTKI yang digunakan oleh para buruh migran dalam memediasi menuju daerah tujuan, yang umumnya daerah tujuan adalah Arab Sudi.

Di Sulawesi Tenggara, dan secara khusus di Kabupaten Konawe, sebagaimana di deskripsikan pada awal bab ini, kebutuhan masyarakat untuk bekerja sangatlah tinggi, namun karena kurangnya lapangan kerja, dimana semakin hari tidak bisa lagi menampung tenaga kerja, maka akan menjadi hambatan dan permasalahan yang cukup besar dalam ketenagakerjaan, semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan pekerjaanpun semakin meningkat, hal ini pada akhirnya berimplikasi pada lapangan kerjapun akan semakin berkurang. Banyaknya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, di tambah lagi semakin ketatnya persyaratan yang harus dimiliki para pencari kerja membuat seseorang haruslah memiliki *skill* khusus, bahkan secara kualitas harus bisa melengkapinya dengan ijazah sarjana (S1). Pada aspek ini, posisi perempuan sangat lemah, karena selain tidak memiliki *skill* khusus, ijazah pun tidak dimiliki oleh perempuan, dengan demikian keadaan ekonomi keluargapun pun akan semakin memburuk.

Akibatnya pencari kerja, baik pria maupun wanita, terpaksa memilih memberikan diri untuk mencari pekerjaan di luar negeri, bahkan diantara mereka ada yang hanya bermodalkan nekad untuk bekerja di luar negeri tanpa didukung dengan keahlian sumber daya manusianya yang memadai.

Selain itu, yang memotivasi para tenaga kerja lebih memilih untuk mengadu nasib di luar negeri adalah dipengaruhi oleh imbalan gaji yang lebih besar dibandingkan besarnya gaji jika bekerja di dalam negeri sendiri (Indonesia), dengan peningkatan taraf hidup yang layak serta tawaran pekerjaan yang melimpah turut menjadi pendorong perempuan untuk bekerja di luar negeri. Di Kabupaten Konawe, terdapat 20 PJTKI yang beroperasi dalam memediasi buruh migran untuk menuju daerah tujuan. Untuk daerah tujuan buruh migran antara lain Oman, Abu Dhabi, dan Qatar.

Pilihan daerah tujuan dapat ditentukan oleh buruh migran sesuai kepentingan dan tujuan buruh migran. Buruh migran perempuan di Kabupaten Konawe umumnya lebih memilih daerah tujuan di Arab Saudi karena secara religi buruh migran perempuan umumnya pemeluk yang beragama Islam. Sampai dengan penelitian ini dilakukan sebanyak 20 PJTKI yang beroperasi di Kabupaten Konawe, jika dilihat dari fungsinya, umumnya memfasilitasi para PJTKI yang akan berangkat sebagai buruh migran, baik buruh migran perempuan maupun buruh migran laki-laki.

Berkaitan dengan kondisi PJTKI, maka diketahui terdapat 20 PJTKI yang beroperasi di Kabupaten Konawe, seluruh PJTKI yang beroperasi memiliki cabang yang berada di luar Provinsi Sulawesi Tenggara maupun di dalam, selain itu masing-masing PJTKI di cabang baik yang berada di Jakarta maupun yang berada di Surabaya memiliki pengurus yang berada di tingkat local (Kabupaten Konawe), dan melalui pengurus di tingkat kabupaten yang memediasi para buruh migran, mulai dari pendataan calon buruh migran hingga penetapan kesiapan keberangkatan di daerah tujuan. Dari penelitian ini terdapat dua PJTKI yang berhasil dimintai keterangannya mengenai proses dan profil organisasi pelaksana PJTKI.

Salah satu PJTKI yang beroperasi di Kabupaten Konawe mengungkapkan bahwa

dalam melakukan operasi lewat perekrutan buruh migran senantiasa berkoordinasi dengan pihak dinas tenaga kerja yang selanjutnya akan diberikan rekomendasi. Kalau PJTKI yang dijalankan di Konawe selalu legal dan mendapat rekomendasi dari pemerintah, bahkan untuk PJTKI yang telah lama dikelola para buruh migran telah ada yang diberangkatkan sampai 5 kali berturut-turut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak PJTKI diperoleh kesimpulan bahwa tujuan adanya PJTKI dan alasan merekrut buruh migran, mempunyai maksud sosial dan nilai keagamaan, melalui pekerjaan buruh migran selain perempuan memperoleh gaji dan pendapatan, para buruh migran juga bisa melaksanakan ibadah haji, bahkan ada di antara buruh migran yang dahulunya tidak menggunakan busana muslim namun setelah akan ke Arab mampu mengubah penampilannya dengan menggunakan jilbab. Adanya anggapan bahwa dengan menggunakan jilbab akan membuat image PJTKI nya akan lebih baik. Sesungguhnya kehadiran PJTKI tidak hanya membantu buruh migran secara sosial ekonomi namun juga meningkatkan nilai ibadahnya, oleh karena itu PJTKI di Kabupaten Konawe hanya memilih tujuan daerah migran ke Timur Tengah bukan di daerah lainnya seperti di Hongkong ataupun Taiwan.

Untuk mengetahui secara internal masing-masing PJTKI yang berada di Kabupaten Konawe, akan di jabarkan dalam bentuk profil organisasi PJTKI. Berdirinya organisasi PJTKI merujuk pada surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara disertai aturan-aturan lainnya yang mengatur kesepakatan resmi antara pihak PJTKI dengan Pemerintah. Secara umum dalam penelitian ini juga di peroleh penjelasan bahwa BNP2TKI yang terletak di Kota Kendari sebagai wadah perlindungan buruh migran jika menghadapi masalah, namun sampai dengan saat ini terdapat masalah di internal PJTKI yang

belum menemukan titik temu berkaitan dengan kuatnya persaingan antara PJTKI, sehingga sulitnya membuat sebuah Asosiasi bagi organisasi PJTKI. Saat ini, untuk semua PJTKI mempertahankan dan cenderung menguatkan PJTKInya masing-masing, bahkan seringkali ditemui di antara PJTKI yang saling menjatuhkan.

Adapun PJTKI yang beroperasi di Kab. Konawe diantaranya adalah PT. Duta Sapta Perkasa dan PT. Rahana Karindo Utama. PT. Rahana Karindo mulai beroperasi pada tahun 2006 dengan tujuan pengiriman di Timur Tengah, sejak tahun 2011 pengiriman buruh migran dihentikan berkaitan dengan pelarangan dari pihak Kementerian Tenaga Kerja, umumnya jumlah buruh migran yang diberangkatkan sebanyak 100 orang untuk sekali keberangkatan, dengan daerah asal buruh migran antara lain Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kabupaten Kolaka. Untuk desa-desa sekitarnya berasal dari Inalahi, Korumba, Meluhu, Ulu, Tinondo, Parauna, Unaasi, Andabia, Lamelai, Kulahi, Lawulo, dan Pu'asana.

Dalam merekrut buruh migran, PT. Rahana Karindo Utama mengutamakan kelengkapan surat-suratnya termasuk yang sangat penting surat izin dari suami. Prinsip PT. Rahana Karindo bahwa keberangkatan buruh migran adalah untuk mensejahterakan diri dan keluarga buruh migran yang ditinggalkan, masa kontrak umumnya 2 tahun, bahkan ada yang lebih dari 2 tahun jika kerjanya di nilai baik oleh majikan. Jumlah gaji rata-rata di atas 2 jutaan, metode dalam merekrut buruh migran tidak ada paksaan bagi calon yang di jadikan target, yang di utamakan adalah buruh migrannya harus berhasil oleh karena itu sejak awal pemberangkatan, para buruh migran dibekali dengan pelatihan pembekalan oleh pihak Dinakertrans di tingkat Kabupaten.

Adapun PJTKI PT. Duta Sapta Perkasa tujuan pemberangkatan buruh migran adalah di Timur Tengah, dengan izin rekru-

itmen diperuntukaan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang punya niatan untuk menjadi buruh migran. Dipilihnya daerah Timur Tengah sebagai daerah tujuan, sebab di Timur Tengah, umumnya majikan member kesempatan kepada para buruh migran untuk melakukan umrah, dan umumnya untuk buruh migran yang telah di berangkatkan pada PT. Duta Sapta Perkasa sudah melaksanakan umrah. Melaksanakan umrah bagi buruh migran merupakan kewajiban majikan sehingga fungsi inilah yang menguatkan PT. Duta Sapta Perkasa diminati banyak calon buruh migran. Dalam organisasi PT. Duta Sapta Perkasa, yang selalu di tanamkan adalah kepercayaan terhadap buruh migran sehingga para buruh migrant selalu merasa puas dan tetap memilih PJTKI pada PT. Duta Sapta Perkasa.

Salah satu kekuatan PT. Duta Sapta Perkasa beberapa kali mengirimkan calon buruh migran dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1), selama 2 tahun bekerja di Timur Tengah dan berhasil mengumpulkan uang, buruh migran-X kembali ke tanah air lalu mengikuti tes CPNS dan dinyatakan lulus, dari hasil pengumpulan uang bekerja sebagai buruh migran yang membantu mencapai target sebagai PNS. Oleh karena itu di PT. Duta Sapta Perkasa telah ada 2 sampai 3 orang buruh migran yang berhasil meraih cita-citanya. Adapun asal desa buruh migran pada PT. Duta Sapta Perkasa berasal dari Kolono, Ladongi, Lasolo, dan Lalosea yang umumnya buruh migrannya berhasil, sedangkan desa-desa lainnya seperti Lambangi, Palarahi, Analahunguta, Lae'a, Putolo, Rodalamapa, Konsel serta Lalosabila.

3. Keadaan dan Jumlah Buruh Migran di Kabupaten Konawe

Sampai dengan penelitian ini dilakukan, dari segi jumlah maupun keadaan buruh migran senantiasa mengalami peningkatan. Namun demikian, bersamaan dengan adanya pelarangan dari pihak Kementerian Tenaga Kerja, maka untuk sementara peng-

iriman buruh migran dihentikan. Oleh karena itu untuk mengetahui secara pasti kondisi buruh migran saat ini, peneliti melakukan kegiatan Focus Group Discussion di Kelurahan Korumba Kabupaten Konawe. Terpilihnya kelurahan Korumbu disebabkan karena berbagai hal, salah satunya di Kelurahan Korumba cukup banyak buruh migran yang telah berhasil secara ekonomi seputangnya dari Arab Saudi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Disamping itu, para buruh migran di kelurahan korumba cukup banyak waktu dalam berdiskusi dengan peneliti ketika proses FGD akan di laksanakan, begitupun waktu yang disediakan oleh para buruh migran ketika akan di lakukan wawancara.

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, dapat diketahui bahwa jumlah buruh migran yang berada di Kabupaten Konawe hingga tahun 2011 sebanyak 327 orang. Jumlah ini hanya berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe yang di data secara legal, belum lagi data buruh migran yang illegal (berangkat tanpa identitas, namun lewat calo), serta data yang bersumber dari lembaga swadaya masyarakat atau NGO lokal. Begitupun untuk kondisi dan keadaan pendidikan, jika kita menganalisis bahwa pendidikan para buruh migran perempuan hanya berhasil menamatkan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), walaupun ada yang menempuh pendidikan SMA hanya sedikit. Oleh karena itu kondisi dan keadaan social buruh migran selalu menjadi persoalan yang tidak ada habisnya.

Dalam kondisi perempuan sebagai buruh migran, tentunya peran perempuan senantiasa berkaitan dengan ideologi gender, dimana perempuan senantiasa tetap bertanggung jawab untuk berperan ganda dengan menyiapkan segala sesuatu bagi keluarga, bahkan dalam lingkup publik yakni memenuhi pelayanan yang tidak mampu di tutup oleh anggaran pemerintah seperti pendidikan dan perawatan kesehatan bagi ma-

sarakat. Kondisi seperti ini masih selalu menjadi legitimasi melalui peran gender perempuan sebagai pekerja sosial di lingkup publik yang tidak perlu di bayar.

Kabupaten Konawe sebagai “kantong” buruh migran secara geografis terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Atas dasar pertimbangan rasional pentingnya penelitian ini di lakukan dikarenakan beberapa hal, salah satunya jumlah buruh migran yang senantiasa meningkat setiap tahunnya serta jumlah peminat calon buruh migran yang tiada henti, terkecuali sejak adanya pelarangan dari Kementerian Tenaga Kerja RI. Selain itu Kabupaten Konawe selain sebagai “kantong” buruh migran, juga terdapat persoalan-persoalan sosial yang belum terselesaikan secara tuntas, yang seringkali dianggap masalah pribadi buruh migran sehingga kurang mendapat respon dari berbagai pihak, terjadinya keterbatasan dari sisi skill, pengetahuan hingga terbatasnya lahan pekerjaan yang dapat di akses oleh perempuan sehingga menjadi bagian terpenting dalam kajian penelitian ini.

D. PENYEBAB PEREMPUAN MEMILIH BEKERJA SEBAGAI BURUH MIGRAN

Penyebab perempuan bekerja, baik di sektor domestik dan terlebih lagi di sektor publik memiliki banyak alasan, pada bagian ini akan di ungkapkan beberapa penyebab perempuan di Kabupaten Konawe khususnya di Kelurahan Korumba memilih pekerjaan sebagai buruh migran. Pilihan perempuan untuk bekerja sebagai buruh migran, tentunya memiliki alasan baik alasan pribadi (keluarga) maupun alasan umum (persoalan sistem pemerintahan). Secara umum, pilihan perempuan bekerja sebagai buruh migran tidak terlepas dari banyak persoalan, dan salah satunya globalisasi. Jika mengacu pada tulisan Wijaya tentang perempuan pekerja migran, diperoleh data bahwa bukan hanya perempuan perkotaan yang ikut dalam pekerjaan seba-

gai buruh migran, namun perempuan pedesaan jumlahnya jauh lebih banyak yang pergi menjual tenaga ke luar negeri. Kepergian perempuan di dukung oleh SAPs dimana komoditi yang di ekspor tidak hanya barang, jasa pun sebagai salah satu yang di ekspor.

Jasa yang dimaksud dalam bagian ini meliputi sumber daya manusia dalam sektor informal *atomistik* sebagai pembantu rumah tangga. Ketika pekerjaan di lapangan pertanian tidak lagi mendukung, baik disebabkan keterbatasan lahan maupun keterbatasan pendidikan hingga persoalan politik, maka peluang untuk ke luar negeri menjadi pilihan yang utama dan di prioritaskan bagi perempuan. Sesungguhnya kontribusi perempuan ketika memilih sebagai buruh migran, pada tingkatan makro baik untuk negara maupun untuk masyarakat sangat bermakna. Perempuan yang bekerja sebagai buruh migran justru memiliki beban yang bertambah seperti beban finansial, fisik hingga beban psikologi. Pilihan sebagai buruh migran dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan yang berani di ambil oleh perempuan, karena perempuan telah berani menentang ranah yang penuh dengan keterasingan, baik budaya, bahasa, hingga lingkungan kerja. Sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, maka pada penelitian ini diperoleh data berkaitan dengan penyebab perempuan memilih pekerjaan sebagai buruh migran antara lain:

1. Mengubah Nasib

Mengubah nasib sebagai salah satu alasan perempuan di Kabupaten Konawe bekerja sebagai buruh migran, kehidupan di pedesaan yang serba pas-pasan dan ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup menjadikan perempuan di Konawe khususnya di Desa Korumba memilih sebagai buruh migran yang bekerja di Timur Tengah. Konsekuensi memilih pekerjaan sebagai buruh migran dengan meninggalkan keluarga di tanah air sangat di sadari

oleh buruh migran perempuan akan menimbulkan banyak resiko. Sebagaimana yang dialami salah satu informan dalam penelitian ini bahwa, selama bertahun-tahun di Timur Tengah dan setiap bulannya mengirimkan uang ke desa, ternyata hanya di gunakan oleh suaminya untuk berfoya-foya bahkan berjudi, kepercayaan terhadap suami dengan menitipkan anaknya akhirnya disalahgunakan oleh suaminya, bahkan biaya sekolah anak yang seharusnya di bayarkan dan di tabungkan tidak dilakukan, sehingga awalnya akan bertahan meneruskan kontrak kerja dengan pihak PJTKI terpaksa harus di tinggalkan, karena informasi dari kampung dan keluarga terhadap kelakuan suami yang tidak lagi bisa di percaya. Dalam penelitian ini juga di ketahui, bahwa mengubah nasib lebih diartikan pada terpenuhinya kebutuhan keluarga di desa.

2. Mencari Pengalaman

Pilihan sebagai buruh migran dapat saja di lakukan oleh siapapun baik perempuan yang telah menikah, belum menikah, status single parent atau memiliki anak. Seperti halnya yang terjadi di lokasi penelitian, banyaknya perempuan yang memilih sebagai buruh migran, bukanlah semata-mata untuk mengubah nasib agar menjadi lebih baik namun sekedar mencari pengalaman hidup juga menjadi alasannya. Salah seorang informan yang masih single menuturkan bahwa, keberangkatannya ke Timur Tengah karena melihat banyak perempuan di kampungnya yang pergi ke Arab sehingga timbul rasa penasaran untuk mencoba. Selama keberangkatannya, oleh pihak PJTKI terpaksa memalsukan dokumen dengan menambah umur calon buruh migran, karena ketertarikan dan rasa penasarannya, walaupun harus mengubah dokumen tetap di ikuti oleh calon buruh migran.

Bekerja sebagai pembantu rumah tangga juga membutuhkan *skill* bagi buruh migran perempuan, sebab akan menimbulkan masalah jika di anggap tidak memi-

liki *skill*. Walaupun ada pelatihan selama satu minggu yang disediakan pihak pengelola PJTKI setelah buruh migran tiba di Jakarta, namun tidak semua buruh migran dapat menyerap dengan baik, selain itu alasan hanya sekedar mencari pengalaman membuat ketidaksungguhan pada buruh migran untuk bekerja dengan baik, ditambah lagi proses adaptasi yang harus disesuaikan ketika berada di daerah tujuan, seperti perubahan cuaca dan factor budaya.

3. Membantu Biaya Pendidikan Anak

Secara sederhana dari penelitian ini diketahui bahwa penyebab buruh migran perempuan memilih bekerja di luar negeri selain karena mengubah nasib, mencari pengalaman, dan untuk membantu membiayai pendidikan anak, maka secara umum juga diketahui bahwa kepergian buruh migran keluar negeri dipengaruhi oleh adanya dua kekuatan yakni *sentrifugal forces* dan *sentripetal forces*, yakni kekuatan yang mengikat seseorang untuk tetap tinggal di daerah asal seperti harta waris, tradisi ritual, dan dekat dengan sanak kerabat, dan kekuatan yang mendorong karena keterbatasan peluang kerja dan keterbatasan akses informasi (*sentry-fugal forces*). Walaupun hasil penelitian yang dilakukan oleh Mitchell menunjukkan keadaan adanya *sentrifugal forces* dan *sentripetal forces* maka pada penelitian ini, kekuatan yang disebutkan di atas juga turut menjadi faktor yang menyebabkan buruh migran memilih sebagai buruh migran.

Dalam ungkapan salah satu informan, memberikan penjelasan bahwa seorang buruh migran harus dapat mengelola keuangannya sehingga dapat dikirim di kampung. Walaupun gaji sesuai yang di bayarkan dalam kontrak, namun jika buruh migran baik terhadap majikan dan keluarganya, akan mendapat pujian dan mendapat bonus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan, bahwa seringkali mendapat bonus karena dalam merawat rumah dapat dipercayakan kepada buruh migran pere-

mpuan sebagai pembantu rumah tangga. Walaupun juga terdapat buruh migran yang saling menjatuhkan satu sama lain. Dalam pengalaman informan, pernah berhadapan dengan hukum di Arab Saudi, karena buruh migran yang berasal dari Indonesia lebih disenangi oleh majikannya daripada buruh migran dari daerah lain seperti dari Brunai atau Thailand. Dalam kasus yang dihadapi oleh informan ini, ketika berhadapan dengan hukum di Arab Saudi, majikannya cenderung memberinya pembelaan sebab majikannya sangat senang dengan hasil kerja informan. Walaupun kondisinya saat ini harus mendapat sanksi hukum.

Peluang kerja untuk memperoleh pekerjaan yang layak dari segi ekonomi menyebabkan buruh migran perempuan lebih memilih ke luar negeri, sebab pendapatan yang diperoleh jika dibandingkan dengan daerah asal sangat berbeda. Artinya, sumber pendapatan buruh migran jauh lebih besar ketika di luar dibandingkan di dalam negeri.

Memanfaatkan peluang kerja di tempat lain juga dikatakan berdampak pada gengsi sosial buruh migran. Rendahnya upah kerja bagi kelompok perempuan yang memiliki keterbatasan seperti kepemilikan ijazah formal, *skill* terbatas, serta akses memperoleh pekerjaan yang sulit menjadi salah satu penyebab buruh migran memanfaatkan peluang kerja di luar negeri. Berdasarkan hasil penelitian ini, secara umum dapat dirumuskan bahwa penyebab buruh migran perempuan di Kabupaten Konawe memilih bekerja sebagai buruh migran perempuan karena mengubah nasib. Pada aspek ini, konteks mengubah nasib lebih banyak di fokuskan pada buruh migran perempuan yang telah berumah tangga, sedangkan penyebab karena ingin mencari pengalaman lebih banyak di fokuskan pada buruh migran perempuan yang masih *single* atau belum menikah. Adapun penyebab karena kebu-

tuhan rumah tangga dalam hal ini ingin menyekolahkan anak (biaya pendidikan) lebih di fokuskan pada buruh migran perempuan yang telah berumah tangga dan memiliki anak usia sekolah. Dengan demikian, untuk buruh migran perempuan di Kabupaten Konawe memilih pekerjaan sebagai buruh migran perempuan di luar negeri khususnya daerah tujuan Timur Tengah sangat berkaitan dengan factor pendidikan yang di miliki perempuan. Pendidikan yang dimiliki buruh migran perempuan yang umumnya hanya memiliki tamatan SMP juga sebagai factor pendukung lainnya yakni lemahnya system pendidikan nasional dan lokal, yang belum berpihak pada perempuan.

E. MASALAH-MASALAH BURUH MIGRAN PEREMPUAN

Buruh migran dimanapun, baik laki-laki maupun perempuan selalu saja memberikan masalah baik pada aspek calon buruh migrannya maupun pada lembaga pemberangkatannya seperti PJTKI. Masalah yang di hadapi juga sangat beragam, ada masalah ringan, masalah berat hingga pada masalah yang sangat berat (mengorbankan jiwa). Pada penelitian ini akan di deskripsikan masalah-masalah yang di hadapi oleh buruh migran perempuan, baik yang terjadi sebelum keberangkatan, selama proses pelatihan hingga setiba bekerja di rumah majikan. Masalah-masalah yang di deskripsikan secara garis besarnya di bagi dalam dua bagian yakni masalah di dalam negeri (di kabupaten, lokasi tempat perekrutan calon buruh migran) dan di daerah tujuan tempat buruh migran bekerja), berikut masalah-masalah yang di hadapi buruh migran.

1. Masalah di Daerah Pengiriman (Dalam Negeri)

Salah seorang buruh migran yang di wawancarai dalam penelitian ini menceritakan pengalamannya selama menjadi buruh migran, yang sejak awal keberang-

katan mengalami masalah. Banyaknya masalah yang di hadapi oleh buruh migran, tidak hanya di lihat pada satu aspek namun dapat di diketahui masalah hingga kepada penyebab yang lainnya. Secara umum, masalah buruh migran, sebagaimana pada penelusuran studi literature yang kami gunakan, juga menemukan masalah yang secara “sistem” terjadi secara kolektif. Misalnya saja, dari pihak pemerintah, masih lemahnya pengawasan serta ketidaktegasan dalam penegakan UU No. 39/2004. Meskipun keberangkatan buruh migran perempuan mendatangkan devisa negara dan *remiten* bagi keluarga, pengiriman buruh migran juga kerap menimbulkan permasalahan sosial baru terutama bagi keluarga di tanah air. Dalam catatan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPA dan KB) salah satunya Kabupaten Tulungagung, mencatat masalah seperti tingginya angka perselingkuhan dan perceraian serta tumbuh kembang anak yang kurang optimal di kalangan keluarga buruh migran. Oleh karena itu mendapatkan masalah-masalah yang terjadi maka ditempuhlah cara untuk mengatasi, sehingga Kabupaten Tulungagung menerapkan kebijakan Bina Keluarga buruh migran. Berkaitan dengan dikeluarkannya kebijakan penerapan Bina Keluarga buruh migran, hal ini sesuai dengan Permen PP dan PA Republik Indonesia No. 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga buruh migrant dan Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina Keluarga buruh migran. Pokja pun kemudian dibentuk di tingkat kecamatan dan desa, diantaranya pada tiga desa percontohan. Sementara itu, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara walaupun telah terbentuk pokja di Kabupaten/Kota namun belum berjalan secara optimal. Kendala yang terjadi, bahwa pelaporan-pelaporan terhadap kasus yang dialami oleh buruh migran lebih banyak yang tidak dilaporkan secara resmi, namun lebih pada advokasi secara “*face to face*” terhadap kor-

ban, sehingga pada posisi ini peran NGO local jauh lebih fungsional dibandingkan lembaga pemerintah setempat. Dalam hasil wawancara terhadap anggota Solidaritas Perempuan Sulawesi Tenggara, di akui bahwa sangat banyak kasus yang dialami oleh buruh migran perempuan di Konawe, namun masih lemahnya regulasi secara nasional hingga local menyebabkan korban buruh migran “enggan” melaporkan kasusnya.

Beragamnya masalah yang dihadapi buruh migran, antara lain di tipu dengan janji-janji bahwa akan diberikan uang saku perharinya Rp. 500.000,- selama masa pelatihan, namun hanya diberikan Rp.250.000, dan lain sebagainya. Lain halnya dengan ungkapan buruh migran lainnya, bahwa masalah yang dihadapi bukan hanya keuangan, tapi juga masalah “suami” yang tidak member izin, namun demikian ada juga yang mengisinkan berangkat kerja ke Arab Saudi tetapi malah menipu kami yang sudah bekerja di luar.

Begitu banyaknya kendala yang di hadapi oleh buruh migran perempuan, bukan hanya persoalan lembaga PJTKI namun juga masalah dalam internal keluarga, pada posisi ini buruh migran perempuan menghadapi tekanan yang kuat. Secara sosial ingin membantu kebutuhan hidup keluarga, namun di lain pihak di rugikan oleh keluarga juga oleh “sistem” yang ada. Bukan hanya itu, ada pula penuturan salah seorang informan yang menyebutkan bahwa, masalah terberat yang dihadapi ketika “disekap” selama berhari-hari oleh salah satu PJTKI di daerah “Jawa” sebagai cabang dari PJTKI yang ada di Kabupaten Konawe. Penyekapan itu dilakukan karena jadwal keberangkatan ke daerah tujuan di tunda dalam waktu yang tidak ditentukan, sehingga pihak PJTKI khawatir jika buruh migran akan “lari” maka mereka di sekap untuk beberapa minggu di sebuah lokasi, hingga akhirnya akan diberangkatkan pada

hari “H”nya. Begitupun pada saat keberangkatan, juga masih terjadi masalah terhadap kesalahan dalam passport.

Berdasarkan penuturan dari beberapa informan, dapat diketahui bahwa masalah yang dihadapi buruh migran perempuan sangat banyak dan bermacam, sehingga diperlukan kebijakan yang tentunya lebih berpihak pada buruh migran. Belum lagi masalah uang di hadapi ketika kepulangannya dari Arab Saudi. Seperti yang di peroleh data ketika diskusi FGD dengan masyarakat local Konawe, bahwa masalah buruh migran di Kabupaten Konawe berlapis dan tidak kunjung selesai. Misalnya saja masalah yang terjadi di Desa Dungua, terhadap salah seorang buruh migran yang dilakukan pelecehan seksual oleh majikannya di Arab, hingga akhirnya buruh migran perempuan ini hamil, dan selama hamil berniat kembali ke tanah air. Setibanya di tanah air, dan melahirkan anak, justru mendapat celaan dari masyarakat sekitar. Bentuk celaannya sangat banyak mulai dari makian, tidak diajak bergaul, dikucilkan dari pergaulan hingga secara formal sulit mendapat “posisi” yang layak sebagai masyarakat pada umumnya. Kesulitan terbesar yang dihadapi ketika pengurusan akte kelahiran untuk anaknya yang dihamilkan di Timur Tengah, si buruh migran ini mengalami kesulitan dalam pengurusan “akta kelahiran” hingga anaknya berusia baligh bahkan sekolah belum memperoleh identitas diri.

Banyaknya masalah yang dihadapi buruh migran perempuan di Kabupaten Konawe, membawa cerita miris, bahwa kehidupan buruh migran tidak hanya seperti yang disaksikan di layar TV atau di media namun kenyataannya di Kabupaten Konawe mereka menghadapi masalah sejak awal keberangkatan hingga ke daerah tujuan selalu persoalan yang tidak kunjung selesai.

2. Masalah di Daerah Tujuan (Luar Negeri)

Pada tahun 2011 sangat banyak peristiwa yang terjadi di tanah air (Indonesia) berkaitan dengan kisah suram kehidupan buruh migran perempuan. Kisah-kisah tersebut berlalu begitu saja dan menorehkan sejuta kisah. Kendati para pendiri negeri ini sudah mengamanahkan kepada pemangku kekuasaan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun nyatanya realisasinya masih jauh dari harapan. Alih-alih menyediakan lapangan pekerjaan yang layak di dalam negeri, pemerintah justru sibuk mencari peluang untuk dapat memobilisasi sebanyak-banyaknya tenaga kerja keluar negeri dengan mematok target perolehan devisa pula. Namun sayang, hal ini tidak dibarengi dengan perbaikan sistem perlindungan yang dijanjikan pemerintah. Pada aspek ini, masalah buruh migran perempuan yang terjadi di daerah tujuan memiliki banyak bentuknya, baik dari tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Masalah yang dihadapi buruh migran, misalnya ketika di tempat kerja mengalami pelecehan oleh majikan atau keluarha majikan.

Menghadapi kasus seperti di atas, umumnya buruh migran perempuan akan menolak, dan biasanya perlakuan yang mereka terima bermacam-macam, seperti akan dikeluarkan dari pekerjaan sebagai pembantu dalam rumah, di ceritakan atau dicarikan masalah agar bisa dikeluarkan, dengan maksud untuk menutupi aib/perbuatan majikan kepada istri ataupun anak majikan kepada orang tuanya. Namun sampai saat ini yang masih saja sering terjadi pelecehan seksual kepada pekerja migran perempuan seperti di hamili dan diperlakukan kasar hingga dikembalikan ke negara tujuan dan di anggap tidak becus dalam bekerja. Salah satu masalah terbesar yang dialami buruh migran perempuan

sebagaimana yang di alami oleh informan "A" di Desa Dunggua Kabupaten Konawe. Yang di ungkapkan oleh Ketua BEK SP Kendari bahwa, Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) alias TKW Indonesia asal Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Konawe salah satu dari sekian korban kekerasan majikan diluar negeri. Tak jarang, hak-hak dasar mereka sebagai manusia diamputasi. Tak hanya gaji yang tidak diberikan. Hak-hak kesehatan diabaikan majikan, buruh migran perempuan (TKW) tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga atau sesama TKI dan tidak diberikan hak pilih Pemilu. Tindak kekerasan pun kerap mereka alami. Penipuan dokumen, pemerkosaan, pelecehan seksual, jual beli tenaga kerja (Trafficking) menjadi teman akrab TKI ditanah rantau. Selain itu tindak kekerasan terhadap tenaga kerja diluar negeri juga diperparah dengan lemahnya perlindungan hukum hak-hak buruh migran. Terutama perempuan. Banyak permasalahan yang dialami buruh migran, terutama Buruh Migran Perempuan, mulai proses perekrutan, keberangkatan yang tidak prosedural, mekanisme kesehatan yang tidak memperhatikan hak-hak buruh migran. Dimana hasil pemeriksaan tidak disampaikan secara terbuka kepada calon buruh migran. Banyak dari mereka yang bekerja lebih dari 12 jam sehari. Tujuh hari dalam seminggu dan tidak memperoleh makanan sehat.

Terdapat kendala teknis dalam proses penyelesaian masalah ketika di alami oleh buruh migran perempuan. Lambannya penyelesain masalah karena persoalan "sistem". Misalnya saja, karena pengelolaan pekerja migran dilakukan lintas kementerian dan lembaga pemerintahan. Seperti Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Ketika buruh migrant perempuan terkena kasus, maka pe-

kerja migran atau keluarganya serta pendamping harus melapor kepada tiga lembaga tersebut. Kondisi ini menyulitkan dan tidak efisien sehingga merugikan pekerja migran yang kasusnya ingin segera dituntaskan.

Disisi lain, fakta yang ditemukan sepanjang proses penelitian di lakukan menunjukkan bahwa selain persoalan di daerah tujuan (Arab Saudi), persoalan yang sampai sekarang belum mendapatkan perhatian yakni proses perlindungan pasca memperoleh “masalah”. Oleh karena itu, jika kita kembali menelusuri secara sosial antropologis bahwa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri khususnya ke Arab Saudi yang telah dilakukan pemerintah, sejak diluncurkan pada tahun 1980-an karena tidak diikuti oleh perangkat Undang-undang yang mampu melindungi pekerja, baik secara hukum maupun politis. Hal ini menyebabkan pekerja perempuan khususnya yang melakukan aktivitas ekonomi di Arab Saudi hampir tidak mendapatkan akses perlindungan hukum yang memadai dari pemerintah. Kondisi ini juga yang menyebabkan pekerja selalu berada pada posisi yang dirugikan secara hukum.

Dalam pengumpulan catatan data sekunder, di ketahui bahwa setiap bulannya Indonesia mengirim sekitar 80.000 tenaga kerja migran ke berbagai negara, dan sekitar 80% di antaranya adalah perempuan. Kebanyakan di antara mereka bekerja dan menjadi pembantu rumah tangga. Banyaknya tenaga kerja migran yang sebenarnya belum siap bekerja di luar negeri, tetapi tetap diberangkatkan juga menjadi masalah tersendiri dalam menyikapi persoalan yang dihadapi buruh migran perempuan. Kadang (mau) dikirim kemana, bahkan masih terdapat buruh migran tidak tahu hak dan kewajibannya, tidak tahu hukumnya, tidak tahu budayanya, ketika berada di daerah tujuan (Arab Saudi).

Dalam data sekunder, peneliti juga menemukan data terbaru berkaitan dengan banyaknya masalah-masalah yang dihadapi buruh migran sejalan dengan banyaknya jumlah buruh migran perempuan yang dikirim ke masing-masing negara tujuan, yang antara lain menyebutkan bahwa negara tujuan penempatan buruh migran yaitu: Arab Saudi; 2.855.856 orang; Malaysia; 2.097.760 orang; Taiwan; 773.872 orang; Singapura; 457.750 Orang; Uni Emirat Arab; 441.640 Orang (*Sumber: BNP2TKI tahun 2012*). Selain itu, berdasarkan data yang dihimpun dari lembaga Solidaritas Perempuan yang berada di tingkat nasional dan lokal Sulawesi Tenggara, menyebutkan jumlah buruh migran yang masih saja mengalami masalah melaporkan bahwa lebih dari 70 kasus pekerja migran dari tahun 2011-2013.

Dari jumlah itu, sejumlah kasus diantaranya berkaitan dengan keluarga pekerja migran yang tidak mendapat informasi dari pemerintah. Minimnya informasi yang diterima keluarga pekerja migran karena pemerintah kurang responsif menjalankan tugasnya memberi perlindungan untuk pekerja migran. Padahal, petinggi Kementerian luar negeri (Kemenuk) menyatakan ada standar operasional pelayanan dalam penanganan kasus, bahkan menegaskan bahwa setiap perkembangannya harus segera diinformasikan kepada keluarga atau pendamping, namun demikian hal tersebut tidak berjalan. Oleh karena itu, Kemenuk membenahi sistem itu sesuai kewenangan yang dimiliki. Keterbatasan informasi yang diberikan pemerintah kepada keluarga pekerja migran merupakan segelintir dari masalah pekerja migran yang belum terselesaikan.

Sesungguhnya konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya sudah diratifikasi untuk menjamin hak atas informasi. Khususnya bagi pekerja migran dan keluarganya. Namun, ada persoalan internal di lembaga pemerintah-

han yang membuat keluarga pekerja migran kesulitan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Untuk itu, hak atas informasi haru dibenahi secara komprehensif dan wajib dimasukkan dalam RUU PPILN yang sekarang dibahas DPR. Sayangnya, dalam RUU PPILN tidak memuat konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya sebagai acuan. Akibatnya, ketentuan yang dirancang dalam RUU PPILN tidak merujuk konvensi tersebut. Khususnya, berkaitan dengan hak atas informasi yang responsif, transparan dan mudah diakses pekerja migran dan keluarganya.

Banyaknya persoalan yang dialami buruh migran perempuan khususnya yang terjadi di Kabupaten Konawe sebagaimana lokasi penelitian ini dilakukan, hingga saat ini masih menimbulkan banyak persoalan social politik yang belum terselesaikan. Baik yang terjadi dalam waktu lama maupun pada saat penelitian ini di lakukan.

Oleh karena itu untuk senantiasa mengatasi persoalan-persoalan yang di hadapi buruh migran perempuan khususnya di kabupaten Konawe, tidak hanya di lakukan dalam bentuk pendampingan, namun juga diperlukan langkah strategis dan antisipatif. Solusi yang menjadi dukungan Pemerintah di Kabupaten Konawe khususnya berkaitan dengan persoalan buruh migran selalu menyisahkan kisah tragis, selain belum adanya regulasi yang berpihak pada buruh migran perempuan secara lokal, juga perseolan "system" dalam hukum dan perundang-undangan di Indonesia secara umum, untuk itu karena persoalan buruh migran perempuan memiliki perbedaan antara satu kabupaten dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia, maka di Sulawesi Tenggara membutuhkan penanganan yang sesuai dengan yang di butuhkan buruh migran perempuan maupun X-buruh migran.

F. BENTUK PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KONAWA

Dalam proses perlindungan maupun pemberdayaan bagi buruh migran di Kabupaten Konawe, akan di kaji dalam beberapa aspek, yakni pihak Pemerintah, non pemerintah (NGO) lokal hingga pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap proses perlindungan maupun pemberdayaan buruh migran. Namun demikian untuk mengetahui secara umum model perlindungan dan pemberdayaan yang di lakukan bagi buruh migran, ada beberapa tahapan yang dilakukan atau biasa disebut sebagai komponen kunci pemberdayaan buruh migran yaitu: Pertama *access to justice* meliputi memberdayakan buruh migran dan keluarga agar memahami hak-hak mereka, dan meningkatkan kapasitas agar bisa mengklaim haknya. Kedua, *access to finance* berupa meningkatkan kappasitas buruh migran dalam hal pengelolaan keuangan dan mendirikan usaha kecil. Ketiga, *access to information*, yakni memastikan buruh migran mendapatkan informasi yang dibutuhkan, menghindari mereka dari penyelundupan manusia, serta memperluas akses informasi mengenai prosedur migrasi aman, negara tujuan, dan informasi-informasi dasar lainnya. Pada aspek lainnya, secara politis melalui program bina keluarga buruh migran juga menjadi salah satu model dalam perlindungan dan pemberdayaan buruh migran.

Berikut ini akan di deskripsikan peran-peran yang di lakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam melakukan perlindungan maupun pemberdayaan terhadap buruh migran perempuan di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan oleh Pemerintah

Pada dasarnya bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap buruh migran dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui program kerja SKPD maupun bersinergi dengan lembaga perempuan dengan membentuk forum bersama. Selama ini untuk Derah Sulawesi Tenggara telah banyak bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan baik dalam bentuk pendampingan maupun dalam bentuk non pendampingan. Melalui P2TP2A yang berada pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Kependudukan, di tingkat provinsi kerjasama tersebut telah berjalan dengan baik walaupun belum sepenuhnya melaksanakan program kerjanya.

Seperti penjelasan oleh bapak Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan, bahwa untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan perlindungan, walaupun belum sepenuhnya di laksanakan namun perlahan-lahan dapat membantu perempuan dari masalahnya. Khususnya berkaitan dengan bentuk perlindungan, maka melalui Perda PUG (pengarusutamaan gender) di Sulawesi Tenggara yang di usulkan oleh Pusat Studi Gender Universitas Haluoleo, Koalisi Perempuan Indonesia dan Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang sumber pendanaannya melalui Kantor BAPEDDA Provinsi Sultra. Adapun untuk bentuk pemberdayaannya dilakukan pelatihan-pelatihan atau penyadaran kritis di tingkat masyarakat (lokasi dampingan) misalnya pemberdayaan dalam bentuk Pelatihan Advokasi Anggaran, Pelatihan UKM serta Pendidikan Gender Dasar. Pada Aspek ini bentuk pemberdayaannya diharapkan kelompok-kelompok perempuan akan lebih kritis dalam berfikir dan mengambil keputusan untuk dirinya dan keluarganya.

Pada aspek lain, berbagai model dan bentuk pemberdayaan perempuan baik

secara khusus dilakukan untuk kepentingan buruh migran perempuan maupun kelompok-kelompok perempuan lainnya. Salah satunya yang dilakukan melalui intervensi TIFA, dengan menginisiasi pembentukan tim terpadu pemberdayaan buruh migran di tiga wilayah ini. Tim terpadu beranggotakan kelompok buruh migran, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil. Tim terpadu ditugaskan mengawal proses pelaksanaan keberlanjutan program serta pengelolaan subgrant yang terdapat di Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Melalui proses pendampingan ini, disimpulkan bahwa ketika pemberdayaan dilakukan mulai dari desa, maka perlindungan itu menjadi nyata hasilnya. Begitupun pada pertemuan nasional akan diserahkan *policy brief* kepada pemerintah pusat dan daerah, untuk mengingatkan semua pihak bahwa program perlindungan buruh migran bisa dilakukan mulai dari hulu, yaitu menyempurnakan undang-undang No 39/2004 agar memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah di daerah, termasuk pemerintah desa. Jika pemerintah desa diperkuat serta didukung oleh keterlibatan organisasi masyarakat sipil, maka perlindungan itu bukan sesuatu yang mustahil.

Khusus di Kabupaten Konawe sebagai “kantong” buruh migran perempuan, maka intervensi untuk perlindungan dan pemberdayaan telah dilakukan secara nyata oleh kelompok-kelompok perempuan, misalnya oleh Solidaritas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, sedangkan yang khusus di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe maupun Provinsi Sulawesi Tenggara biasanya lebih banyak di lakukan melalui Rencana Kerja yang ada di masing-masing SKPD. Bentuk intervensi programnya pun, kurang bersentuhan langsung dengan pemberdayaan untuk buruh migran, namun dikelompokkan dalam bentuk pemberdayaan perempuan secara umum. Adapun SKPD yang selama ini konsen melakukan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yakni Badan

Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sultra, Dinas Sosial Provinsi Sultra dan SKPD lainnya yang memiliki program dalam Pokja Gender. Selain itu, melalui Ormas yang berada di Kabupaten Konawe mengajukan raperda kepada DPRD yang akan dibahas ditingkat pansus dan akan dikonsultasikan kepada bagian hukum untuk perda tersebut. Begitupun terkait perlindungan hak-hak buruh migran perempuan dengan tetap merujuk pada UU No 39, sebab sangat disadari Undang-undang tersebut ada sisi lemahnya juga, karena dari sekian pasalnya hanya 18 pasal yang memuat perlindungan.

2. Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan oleh Lembaga Non Pemerintah

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat lembaga-lembaga yang konsen menangani persoalan perempuan, antara lain Aliansi perempuan Sultra, Koalisi Perempuan Indonesia, Solidaritas Perempuan Indonesia Wilayah Sultra, Perisai Perempuan Sultra, Lambu Ina Muna, Equator, EGSLP Kendari, dan lembaga-lembaga lain yang konsen terhadap isu pemberdayaan. Namun demikian, untuk program pemberdayaan biasanya dilakukan melalui kelembagaan donor baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Beberapa lembaga donor (hibah) yang banyak memberikan bantuan pemberdayaan antara lain, UNDP, Access, Hivos, DNP, Cida Canada, DFID serta lembaga donor lainnya yang belum teridentifikasi dalam penelitian ini. Bentuk pemberdayaan sangat beragam, baik dalam bentuk pelatihan maupun pemberian keterampilan secara langsung. Untuk di Kabupaten Konawe pemberdayaan dilakukan dalam bentuk penyadaran kritis, bukan hanya bersifat jangka panjang dalam bentuk pelatihan, namun melalui solidaritas antara sesama dinilai sebagai salah satu bentuk pemberdayaan dengan memberikan layanan bantuan sosial, banyaknya lokasi yang terkena dampak banjir membe-

rikan masalah baru bagi masyarakat, khususnya kelompok perempuan sebab akan berkaitan dengan peran domestik perempuan di dalam keluarga rumah tangga.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi DAS juga menjadi prioritas utama lembaga-lembaga perempuan untuk mengintervensinya dalam bentuk pemberdayaan, terlebih lagi daerah yang banjir ini umumnya dihuni oleh buruh migran-X. dengan adanya pemberdayaan melalui fungsi DAS atau daerah aliran sungai akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perempuan. Jika dibandingkan perempuan di kecamatan Wunggeduku harus keluar negeri akan lebih baik di lakukan penyadaran dalam bentuk isu-isu strategis di wilayah DAS serta manfaatnya bagi perempuan. Lain halnya di desa-desa lain di Indonesia, yang pernah mengadakan kegiatan pemberdayaan serupa, beberapa lembaga yang juga konsen dalam pemberdayaan buruh migran adalah TIFA.

Salah satu bentuk pemberdayaan yang pernah dilakukan oleh lembaga non pemerintah tersebut seperti pengusulan pada setiap desa yang terdapat buruh migran X dengan membentuk kelompok (organisasi komunitas atau *community based organization* – CBO). Pada model pemberdayaan ini, ketika program berjalan, akan membentuk 87 CBO. Secara pemberdayaan, anggota CBO dilatih komputer dan internet, kewirausahaan, perencanaan keuangan, dan paham hak-haknya serta mampu memperjuangkan hak-haknya. Anggota kelompok yang telah dilatih secara berjenjang melatih atau melakukan sosialisasi kepada komunitasnya. Kepada setiap kelompok diberi dana sebesar Rp. 18.000.000,- untuk dijadikan modal usaha bersama sesuai dengan rencana yang disepakati kelompok sebelum dana dikucurkan. Dalam proses pemberdayaan, salah satu kelompok dapat menggunakan dana tersebut usaha simpan pinjam.

Dalam CBO ini, berjumlah 17 anggota dengan 48 nasabah. Dalam hal pengelolaan keuangan, ada 700 orang yang telah dilatih dan 151 pelatihan keuangan. Selain itu, salah satu ketua kelompok yang telah pernah mengadvokasi buruh migran, melakukan bentuk pemberdayaan setelah mengikuti pelatihan para legal yang pernah diadakan sebuah organisasi non pemerintah, setelah mengikuti pelatihan penanganan kasus dan paralegal, kini sudah menerima 21 pengaduan kasus dan melaporkan ke instansi yang berwenang diantaranya sudah 6 kasus sudah selesai, lainnya masih dalam proses. Secara keseluruhan, ada 88 pelatih paralegal dan paralegal yang bisa memberikan bantuan kepada buruh migran dan keluarganya. Paralegal-paralegal ini telah menangani 83 kasus dan telah melaporkan ke BNP2TKI. 20% dari kasus yang dilaporkan sudah diselesaikan.

Adapun bentuk pemberdayaan dalam kelompok, selain mendapatkan ilmu dalam pelatihan para legal, juga di bentuk rumah internet untuk buruh migran (Mahnetik) sehingga berhasil menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Melalui PKBM (Pusat Belajar Kegiatan Masyarakat) dibicarakan usaha kelompok penanganan kasus dan belajar komputer dan internet. Rumah internet ini sekarang dikenal sebagai tempat untuk berkonsultasi masalah buruh migran dan masalah lainnya yang terjadi di masyarakat. Ada 9 rumah internet yang tersebar di masing-masing kabupaten yang untuk memfasilitasi kebutuhan buruh migran di wilayahnya masing-masing.

Bentuk-bentuk pemberdayaan tersebut, ketika di komunikasikan oleh lembaga-lembaga yang ada di Sulawesi Tenggara baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, menyatakan akan mengusulkan hal yang sama dan akan disesuaikan dengan penyandang pada lembaga donornya.

Lain halnya untuk buruh migran yang ada di Kabupaten Konawe, khususnya di Desa Korumba. Dalam proses diskusi FGD (focus group discussion), usulan yang akan dikerjakan jika ada bantuan berupa kegiatan pemberdayaan bagi X-buruh migran adalah seperti yang di usulkan pada hasil diskusi, antara lain menjual kue (sembako), membuka sawah, berternak sapi, menambah modal dengan jualan ES, menambah modal bisnis agar lebih maju dari yang dulunya kecil menjadi lebih besar, jualan kue khas, meneruskan jahitan dengan minta bantuan mesin jahit, menganyam tikar dan membuat kue khas Arab Saudi. Berdasarkan diskusi tersebut, disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan selain melalui intervensi pemerintah, non pemerintah juga usulan-usulan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat (buruh migran perempuan).

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Buruh migran perempuan merupakan sebuah permasalahan yang dialami secara nasional, begitupun buruh migran perempuan di Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, persoalan buruh migrant masih saja menjadi masalah yang tidak kunjung selesai. Memilih pekerjaan sebagai buruh migran perempuan disebabkan oleh 3 hal. Antara lain, mengubah nasib, mencari pengalaman dan membiayai sekolah anak. Walaupun pekerjaan sebagai buruh migran perempuan memberikan banyak manfaat secara ekonomi, namun disisi lain, terdapat permasalahan social politik yang dialami buruh migran perempuan, baik sejak awal keberangkatan maupun setelah tiba di daerah tujuan khususnya di Timur Tengah (Arab Saudi). Permasalahan yang dialami mulai dari seksual, politis, hingga kekerasan psikologi. Masalah-masalah buruh migran lebih banyak yang diselesaikan sendiri atau meminta pulang di kampung halaman dan

mendapat advokasi (perlindungan) oleh lembaga pendamping setempat.

Lemahnya regulasi yang belum berpihak pada perempuan buruh migran juga menjadi personalan tersendiri karna berkaitan pada “sistem” sehingga kondisi ini semakin melemahkan buruh migran perempuan. Berkaitan negara tujuan, buruh migra perempuan di Konawe lebih banyak memilih Timur tengah (Arab Saudi) yaitu Oman, Qatar dan Saudi.

Pada aspek Perlindungan maupun pemberdayaan buruh migran perempuan dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah, melalui kerjasama antara SKPD terkait serta bentuk pendampingan dan pemberdayaan berupa pelatihan-pelatihan, penyadaran kritis serta peningkatan skill keterampilan bagi buruh migran. Sementara itu untuk menguatkan fungsi hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan, melalui lembaga Koalisi Perempuan Indonesia, Bappeda Sultra, Pusat Studi Gender dan Pemberdayaan Perempuan Unhalu telah di usulkan Perda tentang PUG (pengarusutamaan gender).

2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap kenyataan yang dijumpai di lokasi penelitian, khususnya di Kabupaten Konawe dan beberapa Desa/Kelurahan yang dijadikan sasaran dalam pengambilan data, maka di peroleh saran-saran yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek serta beberapa usulan dalam bentuk rekomendasi. Dalam jangka pendek perlu ada pembinaan-pembinaan tehnik yang berasal dari SKPD terkait guna peningkatan kualitas keluarga buruh migran melalui Bina keluarga mandiri buruh migran, karena program ini merupakan program tahunan SKPD sehingga akan memudahkan secara kontrol dan evaluasi di lokasi buruh migran. Sedangkan dalam jangka panjang akan dikuatkan dalam pembentukan CBO atau penguatan organisasi komunitas buruh migran sehing-

ga memudahkan identifikasi kebutuhan-kebutuhan strategis yang akan diberikan.

Sebagai bahan rekomendasi, maka melalui penelitian ini akan di lakukan dalam tahapan berikutnya lewat usulan pendanaan tahap dua (2) untuk mengadvokasi dalam bentuk penyusunan Naskah Akademik (NA) sehingga akan dilahirkan Ranperda yang khusus mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan buruh migran di Propinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini telah ada PERDA PUG (pengarusutamaan gender) namun Perda tersebut tidak secara khusus mencantumkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Pentingnya mengadvokasi Perda Buruh Migran disebabkan banyaknya persoalan-persoalan yang dialami buruh migran yang belum selesai hingga saat ini (selama penelitian dilakukan gagasan untuk mengusulkan Perda Buruh Migran) diusulkan oleh informan baik yang berasal dari buruh migran sendiri, SKPD, hingga para pendamping ormas (LSM) di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustinus (2006). *Perlindungan Hak-hak Asasi Perempuan Pekerja Migran: Peluang dan Tantangan Indonesia*. (Publikasi Ilmiah Pada Penguahan Guru Besar). Yogyakarta: UGM.
- Astuti P. Trimarhaeni (2005). *Redefinisi Eksistensi Perempuan Migran: Kasus Migran kembali di Godong Jateng*. (Disertasi S3). Yogyakarta: UGM.
- Astuti P. Trimarhaeni (2002). *Perempuan Perkasa di Tengah Hutan: Kasus Buruh Perempuan Agroindustri Minyak Kayu Putih di Grobongan Jawa Tengah*. Jurnal Studi Wanita. Vol. 1. No.2.

- Budiarti, Hari. 1989. *Dua Tipe rantau di Aceh*. Jurnal Antropologi Th V. No. 15. Yogyakarta: FS UGM.
- Dessyanthy, Regilna. (2007). *Studi Kelangsungan Hidup Buruh Migran Perempuan*. (Tesis S2). Yogyakarta: UNY.
- Denzin, K. Norman (2009). *Kualitatif Research*. Pustaka Pelajar.
- Geertz, Hildred (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiz, Lisa (2004), *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta:LP3S,
- James, Allison (2001). *Ethnography in the Study of Children and Childhood*, dalam Atkinson, Paul (ed): *Hand-Book of Ethnography*. London: Sage Publication.
- Lucas. (1995). *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Kartasapoetra. (1992) , *Kamus Sosiologi dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kesuma, Andi Ima. (2004). *Migrasi dan Orang Bugis*. Yogyakarta: Ombak.
- Pitoyo, Joko Agus (2005), *Pekerja Perempuan Di Luar Negeri, Melawan Pelecehan, Merajut Keberdayaan*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta:UGM.
- Setiadi (2009). *Dinamika Otonomi Perempuan Desa: Studi Antropologi Dampak Migrasi Internasional di Pedesaan Jawa*. (Disertasi S3). Yogyakarta:UGM.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Etnoreflika harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
2. Naskah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori tentang fenomena sosial dan budaya.
3. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas A4 dengan huruf *Times New Roman* 12 spasi 1,5. Margin atas 4 cm, kanan 3 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm . Jumlah halaman 10-20 halaman di luar daftar pustaka dan tabel.
4. Sistematika penulisan naskah, yaitu: (a) judul naskah; (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) asal institusi dan alamat, telepon, fax, atau email (d) abstrak (maksimum 100-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; (e) kata kunci (2-5 kata); (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang memuat latar belakang, masalah, tujuan penulisan, kerangka teori; (g) metode penelitian (jika naskah merupakan hasil penelitian); (h) pembahasan yang disajikan dalam subbab; (h) penutup; (i) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka dan sumber lainnya disusun secara alfabetis dan kronologis dengan mengikuti tata cara sebagai berikut.

Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. (rujukan buku)

Hill, Erica. 1998. Gender-Informed Archaeology: The Priority of Definition, The Use of Analogy, and The Multivariate Approach” dalam *Journal of Archaeological Method and Theory*, Vol. 5, No. 1. (rujukan jurnal ilmiah)

Hugo, Graeme J. et al. 1987. *The Demographic Dimension In Indonesian Development*. New York: Oxford University Press.(Rujukan buku dengan 4 pengarang atau lebih)

Landa, Apriani. 17 Juli 2008. “Tekad Siswa Bersih Narkoba” dalam *Tribun Timur*. hlm 14. (rujukan surat kabar/majalah).

Suparlan, Parsudi. 2008. *Struktur Sosial, Agama, dan Upacara. Geertz, Hertz, Cunningham, Turner, dan Levi-Strauss*. Online. (<http://prasetijo.wordpress.com/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham-turner-dan-levi-strauss>). Diakses pada tanggal 21 Januari 2009. (rujukan internet)

6. Naskah dikirim dalam bentuk print out disertai file dalam compact disk (CD) atau flash disk dengan menggunakan pengolah data *Microsoft Word* ke alamat redaksi.
7. Redaksi membuka kesempatan bagi siapa saja (peneliti, dosen, guru, dan tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah.
8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui pos atau e-mail. Naskah yang dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan dan format penulisan sesuai petunjuk penulisan naskah Jurnal Etnoreflika.
10. Biodata penulis ditulis dalam lembar tersendiri.

Alamat Redaksi

Laboratorium Jurusan Antropologi

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Halu Oleo

Kampus Bumi Tri Dharma

Jalan H.E. Agus Salim Mokodompit Kendari 93232

Telepon/Fax. (0401) 3191299, e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com



JURNAL ETNOREFLIKA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Bumi Tridharma

Jalan H.E. Agus Salim Mokodompit Kendari 93232

Telepon/Fax. (0401) 3191299 e-mail,: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com

